

EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH KANTOR LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Rani Aryani

Ranyaryani36@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jl. R.E. Martadinata Nomor 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan pada Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan ini berawal dari adanya permasalahan, bahwa ternyata adanya manipulasi dalam pengusulan masyarakat miskin terutama dalam pendataan yang dilakukan, sehingga berdampak pada munculnya ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis dan 3 orang Kasi Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pendataan masyarakat miskin sudah tepat sasaran, namun masih belum optimal belum terealisasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dari perangkat desa dan masyarakat sekitar dalam pengusulan masyarakat miskin untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, adanya manipulasi dalam pendataan, data yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria masyarakat miskin, dan terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah melakukan wawancara dengan pengusul program, kerjasama dengan perangkat desa dalam mengecek status ekonomi, berkoordinasi dengan pihak desa untuk mendata sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin, dan mengusulkan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Kata kunci : Evaluasi Program

A. PENDAHULUAN

Berbagai pengembangan program dan layanan unggulan yang dijalankan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun kebijakan, seolah semakin mempertegas bahwa organisasi pemerintah mampu bergerak lebih fleksibel dan mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan. Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai program keunggulan yang didasari atas kondisi yang spesifik, kemampuan dan kepentingan pemerintahnya. Salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, adalah adanya program penanggulangan kemiskinan. Inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) yang secara komprehensif membuat gebrakan membantu masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di berbagai bidang yaitu: Bidang Kesehatan dengan Program Kartu Waluya, Bidang Pendidikan dengan Program Kartu Calakan, Bidang Sosial Ekonomi dengan Program Kartu Waluya.

Atas dasar hal itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis membentuk Kantor Layanan Terpadu

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, tujuan Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk memenuhi layanan dasar dalam menanggulangi kemiskinan, yang meliputi program kesehatan, program sosial, dan program pendidikan.

Sebagaimana dari hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan atas dasar hal tersebut, selanjutnya dilakukan observasi mendalam pada Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis terkait dengan mengimplementasikan program bantuan kemiskinan yang meliputi bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang selama ini telah dilakukan. Adapun dari hasil observasi ditemukan berbagai faktor yang menyangkut pengimplementasian program penanggulangan kemiskinan, diantaranya :

1. Pendataan masyarakat miskin belum memenuhi sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Realisasi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin masih menggunakan data tahun 2011 sehingga masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan belum terdaftar di Pembaruan Basis Data Terpadu (PBDT).
3. Penentuan target sasaran yang ditetapkan oleh desa yang seolah banyak manipulasi dan kurang transparan, sehingga yang seharusnya masyarakat dikategorikan benar-benar tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan.

Berhubungan kepentingan penelitian ini penulis mengambil kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2000:610) terdiri dari :

1. Efektivitas (*effectiveness*)
2. Efisiensi (*efficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Perataan (*equity*)
5. Responsivitas (*responsiveness*)
6. Ketepatan (*appropriateness*)

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka anggapan dasar dalam penelitian ini disusun dengan berdasarkan asumsi bahwa penerapan kriteria evaluasi kebijakan didalam program penanggulangan kemiskinan, tentunya diperlukan analisa dan pendekatan secara komprehensif atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tinjauan dari penerapan kriteria evaluasi kebijakan agar dapat terwujudnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan baik dalam memberikan program penanggulangan kepada masyarakat miskin.

B. LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi program penanggulangan kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis, maka diambil beberapa teori yang relevan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini, teori tersebut diambil dari beberapa sumber mengenai evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan beberapa teori pendukung lainnya.

Bila dilihat berdasarkan pengertian secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi program dari suatu kebijakan pemerintah dan memberikan dampak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Muhadjir (Widodo, 2008:112) mengemukakan bahwa “evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Dalam definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Maka demikian, melakukan kegiatan program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik agar suatu tujuan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Bupati pasal 1 ayat 5 No 29 Tahun 2016 Tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa “kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum”.

Pengertian penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati pasal 1 ayat 5 No 62 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa:

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program yang pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan menyusunnya dalam suatu klasifikasi tertentu kemudian menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Mely G. Tan (Silalahi, Ulber 2012 : 28) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah :

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari sedikit-banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

Mayer dan Greenwood (Silalahi, Ulber 2012:27) mengemukakan “penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa”. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Deskriptif seperti ini melambangkan tahap permulaan dari perkembangan suatu disiplin.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai pada Februari 2018 sampai dengan Juli 2018.

Tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2002:106) “sumber penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Selanjutnya Sugiyono (2017:137) menjelaskan bahwa:

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Kasi Pendidikan, Kasi Kesehatan dan Kasi Sosial dan Ekonomi di Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer adalah:
 - a. Kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis 1 orang.
 - b. Kasi di Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis 3 orang.
- 2) Sumber data sekunder adalah:
 - a. Buku literatur
 - b. Dokumen hasil penelitian
 - c. Peraturan – peraturan Bupati Daerah Kabupaten Ciamis

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010:224), mengemukakan: “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan
Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
- 2) Studi Lapangan
Yaitu teknik pengumpulan data dan penyeleksian data secara langsung yang di peroleh dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan
 - b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan sumber informasi/informan.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada aktivasi dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017 : 247) adalah Reduksi Data (*data reduction*), Paparan Data (*data display*), dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Data reduction* / reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selain itu, redaksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.
2. *Data display* / paparan data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing* / *verification* / penarikan kesimpulan dan verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini difokuskan kepada kriteria evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori yang telah di jelaskan pada bagian pendahuluan, maka dengan ini ditarik indikator-indikator yang digunakan yakni :

1. Efektifitas (*effectiveness*)
 - a. Ketepatan sasaran pendataan masyarakat miskin
 - b. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin
2. Efisiensi (*efficiency*)
 - a. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara cepat dan tepat
 - b. Alokasi biaya bantuan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan
3. Kecukupan (*adequacy*)
 - a. Menggunakan metode berdasarkan analisis ketepatan sasaran
 - b. Disediakan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan
4. Perataan (*equity*)
 - a. Dirasakan dan diterima oleh seluruh masyarakat miskin

- b. Berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan
5. Responsivitas (*responsiveness*)
 - b. Memiliki ketanggapan atas permohonan masyarakat miskin
 - c. Menyediakan kebutuhan atas sesuai harapan masyarakat miskin
 6. Ketepatan (*appropriateness*)
 - a. Mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat miskin
 - b. Memiliki dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin

a. Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis

Adapun didalam proses pengumpulan data penelitian melalui teknik wawancara dan studi lapangan, penulis membatasi berdasarkan focus kajian, menurut Dunn (2000:610) mengemukakan :

1. Efektifitas (*effectiveness*)
2. Efisiensi (*efficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Perataan (*equity*)
5. Responsivitas (*responsiveness*)
6. Ketepatan (*appropriateness*)

Hasil penelitian pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis untuk setiap dimensi tersebut peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *Efektifitas* (*effectiveness*) untuk pelaksanaannya indikator ketepatan sasaran dalam pendataan masyarakat miskin dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin yaitu sudah tepat sasaran dan program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Selanjutnya observasi dilapangan menyatakan bahwa masih adanya dalam pendataan belum tepat sasaran sehingga dalam realisasi program bantuan penanggulangan kemiskinan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *Efisiensi* (*efficiency*) untuk pelaksanaannya indikator program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara cepat dan tepat serta alokasi biaya bantuan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dikatakan kurang. Ditandai dengan masih

adanya proses pembuatan program yang cukup lama dan dari alokasi biaya masih terbatasnya anggaran untuk realisasi program kepada masyarakat miskin.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *kecukupan (adequacy)* untuk pelaksanaannya indikator menggunakan metode berdasarkan analisis dan disediakan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dikatakan kurang. Ditandai dengan masih belum dilaksanakannya pendataan masyarakat miskin yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin, sehingga alternatif yang disediakan untuk memecahkan masalah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang benar-benar miskin.

4. Perataan (*equity*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi perataan (*equity*) untuk pelaksanaannya dengan indikator dirasakan dan diterima oleh seluruh masyarakat miskin dan berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dikatakan kurang baik. Ditandai dengan pendistribusian program penanggulangan kemiskinan belum semuanya merata dan masih banyak masyarakat miskin yang belum sejahtera

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi responsivitas (*responsiveness*) untuk pelaksanaan dengan indikator memiliki ketanggapan atas permohonan masyarakat miskin dan menyediakan kebutuhan sesuai harapan masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketanggapan Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis atas pengusulan program penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang sudah mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang belum dapat terealisasi sehingga masyarakat miskin tidak merasa puas dengan disediakan program penanggulangan kemiskinan sesuai harapan masyarakat miskin.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ketepatan (*appropriateness*) untuk pelaksanaan dengan indikator memiliki ketanggapan atas permohonan masyarakat miskin dan menyediakan kebutuhan sesuai harapan masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum memahami program penanggulangan kemiskinan, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa masyarakat miskin yang salah dalam menggunakan bantuan tersebut, seperti halnya dalam bantuan untuk beasiswa siswa miskin tetapi digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk dampak yang diberikan program penanggulangan kemiskinan dilihat masih adanya masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu atau tergolong masyarakat jompo yang belum menerima bantuan program penanggulangan kemiskinan, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat merasakan langsung haknya dari program penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah Kabupaten Ciamis.

b. Penunjang dalam Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis

Ditemukan bahwa faktor-faktor yang dapat menunjang dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Legalitas surat keterangan miskin dari yang bersangkutan yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW.
2. Melakukan survei secara langsung ke setiap desa.
3. Memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat yang benar-benar miskin.
4. Pendataan dari daerah dalam mendata masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis yang belum masuk ke Badan Pusat Statistik (BPS) pusat.
5. Dukungan dan bimbingan dari Bupati secara langsung dalam merespon dan menanggapi langsung permohonan masyarakat miskin.
6. Kesigapan dan kesiapan perangkat desa dalam mengajukan masyarakat yang benar-benar miskin.
7. Anggaran yang lebih besar untuk merealisasikan masyarakat yang belum menerima bantuan.
8. Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin.
9. Koordinasi dengan semua pihak desa.
10. Degan tiga program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari program kartu waluya, kartu calakan, dan kartu walagri.

11. Dalam bidang kesehatan dengan pemberian program kartu waluya yang disediakan pengobatannya gratis bagi masyarakat miskin.
12. Hasil pendataan masyarakat miskin yang sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin.
13. Komunikasi antara Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis dengan masyarakat miskin.
14. Pihak lain mempromosikan program-program yang disediakan.
15. Dalam bidang kesehatan lebih banyak fasilitas kesehatan yang menerima program kartu waluya maupun pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

c. Hambatan-hambatan dalam Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan evaluasi program penanggulangan kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak adanya data-data yang benar-benar valid dan akurat dalam pengusulan ke Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis sehingga sulit untuk menentukannya.
2. Adanya manipulasi dalam pendataan masyarakat miskin untuk pengusulan dari setiap desa yang mengajukan bantuan program penanggulangan kemiskinan.
3. Data yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria masyarakat miskin.
4. Belum adanya pendataan keluarga miskin untuk Kabupaten Ciamis, sehingga dalam penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat miskin belum dilaksanakan secara cepat.
5. Tidak adanya kerjasama dengan pihak desa yang bersangkutan dan kurangnya pegawai Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis untuk melakukan survei langsung dalam pendataan masyarakat miskin.
6. Terbatasnya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengcover seluruh masyarakat miskin.
7. Kurangnya kesadaran dari setiap desa kepada masyarakat miskin sehingga masih adanya pendataan masyarakat miskin yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

8. Mengambil dari bidang kesehatan yaitu kurangnya fasilitas kesehatan yang membedakan antara pengguna umum dengan pengguna jaminan kesehatan.
9. Kurangnya perangkat desa dalam memberikan arahan mengenai program penanggulangan kemiskinan.
10. Dilihat dari bidang kesehatan masih adanya pelayanan yang kurang bagi pengguna jaminan kesehatan.

d. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut :

1. Berupaya dengan melakukan wawancara dengan pengusul program penanggulangan kemiskinan dan diwajibkan melampirkan foto-foto sebagai bukti yang akurat.
2. Adanya kerjasama dengan perangkat desa untuk mengecek status ekonomi masyarakat yang akan disasar sehingga tidak terjadi manipulasi.
3. Dilakukannya menyeleksi masyarakat miskin seseleksi mungkin sesuai dengan kriteria masyarakat miskin dan dilihat dari bukti-bukti yang telah diusulkan.
4. Mengajukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diadakannya pendataan di daerah Kabupaten Ciamis.
5. Adanya kerjasama antara perangkat desa dengan Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis untuk mensasar masyarakat miskin.
6. Mengusulkan anggaran lebih besar kepada pemerintah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Berkoordinasi dengan pihak desa untuk mendata dengan format-format yang sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin.
8. Untuk dalam bidang kesehatan yaitu ditingkatkannya pelayanan kesehatan dalam melayani pengguna program kartu waluya.
9. Melakukan sosialisasi dengan perangkat desa setiap daerah mengenai program penanggulangan kemiskinan.
10. Dalam bidang kesehatan mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan

memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kartu program waluya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengenai hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serta dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program penanggulangan kemiskinan oleh Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal. Terlihat pada masih banyaknya masyarakat miskin yang belum masuk ke dalam data Pembaruan Basis Data Terpadu (PBDT) dan dalam pendataan masyarakat miskin yang masih belum tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati no 29 tahun 2016 tentang indikator lokal keluarga miskin, sehingga masih banyak masyarakat yang benar-benar miskin belum mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berbentuk program kartu waluya, program kartu calakan, dan program kartu walagri. Hal ini dikarenakan pada beberapa indikator ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah adanya manipulasi dalam pendataan masyarakat miskin karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar yang hanya mementingkan kepentingan keluarga tanpa melihat masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah dan masih kurangnya anggaran dari pemerintah untuk merealisasikan bantuan program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat miskin yang semakin banyak mengusulkan ke Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan meliputi dalam melakukan pendataan menggunakan metode yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin dengan disertai wajib melampirkan bukti-bukti yang akurat seperti foto untuk diseleksi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dari dana yang kurang untuk merealisasikan semua usulan program sehingga dilakukannya pengusulan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jika tidak ada dari pemerintah daerah maka mengusulkan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah.

Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bagian ini diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Agar pendataan masyarakat miskin tepat sasaran, perlunya verifikasi data yang masuk dalam pengusulan program penanggulangan kemiskinan serta dalam pendataan yang dilakukan harus mengacu pada Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin sehingga.
2. Perlu dilakukannya pendampingan dari Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis dalam pendataan masyarakat miskin agar tidak terjadinya manipulasi, sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu mendapatkan bantuan.
3. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program penanggulangan kemiskinan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan guna meminimalisir terjadinya permasalahan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta:Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika:Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin
- Peraturan Bupati No 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis